

Tingkat Pemahaman Pemilih Pelajar SMA Tentang Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2024 di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Oktavia Nur Wulandari¹, Warsono²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: oktavia.19083@mhs.unesa.ac.id¹; warsono@unesa.ac.id²

Abstrak

Pada pelaksanaan pemilu 2024, pemilih pemula generasi z mendominasi dengan tingkat persentase 56,45%. Pemilih pemula yang masuk dalam DPT di Pemilu tahun 2024 pada Kabupaten Sidoarjo sejumlah 3,614 pemilih. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman pemilih pelajar SMA tentang prosedur pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknis analisis data prosentase. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan satu variabel yakni tingkat pemahaman pemilih pelajar SMA. Hasil yang diperoleh dari 114 pelajar. Analisis hasil yaitu tingkat pemahaman pemilih pelajar SMA tentang prosedur pelaksanaan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Rata-rata keseluruhan skor tingkat pemahaman pemilih pelajar Kabupaten Sidoarjo adalah 129,70 yang masih tergolong dalam kategori tinggi. Dengan ini, diharapkan dari pihak sekolah, *stakeholder* pemilu berkerjasama dalam mensosialisasikan secara lebih kepada pemilih pelajar, hal tersebut akan berpengaruh terhadap partisipasi politik sehingga mampu melahirkan partisipan yang selektif, berkualitas dan cerdas.

Kata kunci: *Tingkat Pemahaman Politik, Pemilih Pelajar SMA, Pemilu*

Abstract

In the 2024 elections, generation z first-time voters dominate with a percentage of 56.45%. There are 3,614 beginner voters included in the DPT in the 2024 elections in Sidoarjo Regency. The aim of the research is to describe the level of understanding of high school student voters regarding election procedures in Sidoarjo Regency. The research method is descriptive quantitative research with percentage data analysis techniques. The sampling technique uses purposive sampling. This research uses one variable, namely the level of understanding of high school student voters. Results obtained from 114 students. Analysis of the results, namely the level of understanding of high school student voters regarding the procedures for implementing general elections in the Sidoarjo Regency area, has a high level of understanding. The overall average score for the level of understanding of Sidoarjo Regency student voters is 129.70, which is still classified as high. With this, it is hoped that the school and election stakeholders will work together in providing more outreach to student voters, this will have an impact on political participation so that it can produce selective, qualified and intelligent participants.

Keywords: *Level of Political Understanding, High School Student Voters, Elections*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki sistem politik yang disebut politik demokratis. Demokrasi ialah sistem politik yang memberikan ruang keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. (Solihah, R., Bainus, A. & Rosyidin, I. 2018: 14-28). Identik dari negara demokrasi adalah

partisipasi langsung dan tidak langsung warga negara atau individu dalam pengambilan keputusan politik. Pemilihan umum bentuk salah satu dukungan sistem demokratis pada negara. Kegiatan tersebut sebagai sarana demokrasi bagi warga negara menciptakan politik rakyat dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu dan pantas menempati jabatan yang diberikan (Muhammad, H. A., Nopyandri, N., & Babas 2020:19). Pemilu juga sarana demokrasi menciptakan sistem pemerintah yang berkedaulatan pada rakyat.

Salah satu bentuk pemerintahan demokratis adalah melalui pemilihan umum. Rakyat memainkan peran yang sangat penting dalam struktur demokrasi. Masyarakat, atau rakyat, memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilu, karena mereka berfungsi sebagai pemilih dan menentukan siapa yang menang dalam pemilu. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 339 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, peserta pemilu didefinisikan sebagai individu yang berpegang teguh dalam memilih dan melaksanakan prosedur pemilu dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan rakyat. Pemilihan umum adalah perwujudan partisipasi aktif politik warga negara, sukses atau tidaknya pelaksanaannya dipengaruhi oleh partisipasi peserta. Sehingga dalam pemilihan umum partisipasi politik memiliki pengaruh legitimasi masyarakat pada pasangan calon terpilihnya (Arniti, 2020: 329-348).

Makna dari partisipan di atas ialah warga negara yang menginjak usia terendah 17 tahun atau sudah kawin atau belum yang memiliki hak dalam memilih. Menurut UU RI No.10 Tahun 2008 terkait pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD di BAB IV pasal 19 (ayat 1 dan 2) menjelaskan pemilih berarti warga negara Indonesia yang telah terdaftar dan memiliki hak untuk memilih calon pasangan yang diinginkan dan berekspresi untuk kelangsungan tatanan demokrasi. Berdasarkan ketentuan di atas, warga negara yang telah mencapai umur 17 tahun berhak memilih. Pemilih pertama adalah mereka yang berumur 17 hingga 20 tahun atau mereka yang baru pertama kali memberikan suara dalam suatu pemilu. (Muhammad, H.A., Nopyandri, N. & Babas, U. 2020, hal 19).

Pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 bertempat di Fave Hotel Sidoarjo, Jl. Jenggolo No. 15 Pucang Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sidoarjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada rapat pleno tanggal 21 Juni 2023 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sidoarjo Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Sidoarjo menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) kabupaten Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SIDOARJO					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
18	346	5566	721.038	740.064	1.461.642

Gambar 1. Rekapitulasi DPT Kab. Sidoarjo
(Sumber : <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/>)

Data tersebut diperoleh berdasarkan sumber (<https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/>) yang berisikan data rekapitulasi daftar pemilih tetap atau (DPT) di wilayah Kabupaten Sidoarjo bahwa telah terdaftar berjumlah 18 kecamatan dengan sebanyak 346 kelurahan atau desa. Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5566 dengan jumlah daftar pemilih tetap yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sejumlah 721.038 sedangkan perempuan sejumlah 740.064. Apabila dihitung secara total maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.461.642.

Komisi Pemilihan Umum akrab disingkat KPU oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di kantor KPU Jakarta mengatakan, angka tersebut didominasi oleh kelompok muda terutama Gen-Z. Dominasi Gen-Z diakumulasikan maka berjumlah lebih dari 113 juta pemilih dengan tingkat presentase 56,45% dari jumlah seluruh partisipan pemilu 2024. Bentuk dominasi pemilih muda ini akan menjadi sebuah peluang dan tantangan, hal ini dikarenakan mereka adalah penentu masa depan bangsa sehingga keterlibatannya penting dalam proses demokrasi.

Rahmat Muhajirin anggota DPR RI Dapil Jatim 1 (Surabaya – Sidoarjo) menyampaikan, bahwa pada Pemilu 2024 jumlah pemilih pemula sangat banyak berkisar 54 %. KPU bersama dengan DPR RI gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan umum untuk menghadapi Pemilu serentak 2024. Sosialisasi terhadap kaum muda tersebut KPU sudah menyiapkan transformasi sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan informasi. Transformasi KPU sudah membuat *Website* serta media-media sosial yang ada di masyarakat untuk mudah di capai, dibuka, didapatkan dan untuk dipahami. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pemilih pemula kesempatan untuk belajar tentang politik. Pada generasi Z ini, *smartphone* dan media sosial adalah hal yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang rentan sekali menjadi tempat penyebaran hoaks saat Pemilu.

Maka dari itu, dengan terselenggarakannya bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU, untuk mengetahui tingkat pemahaman sebagai pemilih pemula, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pemahaman Pemilih Pelajar SMA tentang Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2024 di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan memilih pemilih pelajar SMA yang dalam hal ini adalah pelajar tingkat SMA kelas XII karena rata-rata usia bagi siswa kelas XII yakni 17 tahun karena pada usia 17 tahun atau lebih tersebut sudah memiliki hak untuk memilih sebagaimana dalam pasal dalam undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tujuan partisipasi pemilih pelajar dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 adalah untuk mempertahankan partisipasi politik mereka. Jika kuota pemilih pemula ini dapat dipenuhi dengan terus berpartisipasi dalam proses demokrasi, ini akan dapat membawa era demokrasi Indonesia ke tahap yang lebih baik.

Rumusan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman pemilih pelajar SMA tentang prosedur pelaksanaan pemilihan umum presiden 2024 di wilayah kabupaten sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Pemilih Pelajar SMA tentang prosedur pelaksanaan pemilihan umum presiden di tahun 2024 mendatang. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, jelas bahwa masalah dan diskusi yang akan diteliti akan tetap ada dan akan berkembang secara signifikan. Akibatnya, jumlah masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Karena itu, penelitian ini akan berfokus pada Tingkat Pemahaman Pemilih Pelajar wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya pada tingkat Pelajar SMA.

Kajian teoritis dari penelitian mendefinisikan makna penjelasan pemilih pemula, pemilih pemula adalah mereka yang baru saja mengikuti pemilu atau berusia antara 17 dan 20 tahun (Muhammad, H. A., Nopyandri, N., & Babas, U., 2020: 19). Semua warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan telah genap berusia 17 tahun atau lebih dianggap sebagai pemilih dalam pemilu. Selain itu, mereka harus sudah atau pernah menikah. Pemilih pemula, yang baru berusia 17 hingga 21 tahun, adalah yang pertama kali menggunakan hak mereka untuk memilih, karena penyelenggara pemilihan umum mempekerjakan petugas untuk pendataan dan mendaftarkan pemilih untuk setiap pemilihan umum. syarat yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang memilih antara lain: (1) Warga Negara Indonesia dengan minimal usia 17 tahun atau lebih atau sudah kawin; (2) tidak memiliki gangguan kejiwaan; (3) bukan bagian dari anggota TNI dan Polri; (4) erdaftar sebagai pemilih; (5) hak pilihnya tidak sedang dicabut; (6) teridentifikasi di DPT; (7) ada pemilukada calon pemilih berdomisili sekurangnya 6 bulan di daerah tersebut (Yusdianto, 2010: 44).

Kajian literatur yang kedua adalah tentang politik. Teori politik adalah ide abstrak yang muncul dalam pikiran manusia dan digunakan untuk membuat generalisasi abstrak tentang berbagai fenomena, yang disebut teori. Selanjutnya adalah perilaku politik, menurut Almond

dan Powell (dalam Efriza, 2012: 88), perilaku politik mencakup semua tingkah laku politik yang ditunjukkan oleh para aktor politik dan warga negara. Tingkah laku ini terkait erat dengan kultur politik Almond dan Powell. Pada dasarnya, perilaku politik adalah interaksi yang terjadi selama proses pengambilan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik antara pemerintah, lembaga pemerintah, dan kelompok masyarakat dan individu (Ramlan Surbakti, 1999: 75). Perilaku politik sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik, partisipasi politik merupakan hal krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan penyaluran hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Hak, menurut Notonagoro, adalah kemampuan untuk menerima atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh satu pihak tetapi tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada dasarnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Tersalurnya hak politik warga negara melalui pemilihan umum, tidak lepas Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Lembaga KPU berhak menyelenggarakan sosialisasi pemilu, sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih melalui forum komunikasi maupun dalam media massa yang berisikan informasi tentang tahapan/ prosedur/ tata cara/ program dalam pelaksanaan pemilu. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada masyarakat atau partisipan terlebih seorang pemilih baru. Tujuannya yaitu untuk membentuk pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pemilu sehingga dapat terciptanya pemilih yang cerdas, berkualitas dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, karena menurut peneliti Sidoarjo merupakan wilayah yang telah melakukan sosialisasi pemilu pada bulan September 2022 terhadap pemilih baru dengan peserta sebagian besar adalah kaum pelajar dari SMA yang merupakan kelompok pemilih pemula. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu bulan Februari sampai Oktober. Populasi dalam penelitian ini adalah pelajar tingkat SMA yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah 3,614 orang. Syarat populasi dapat menjadi sampel antara lain: (1) Kategori sebagai Pemilih Pemula, maupun; (2) Pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun atau Pemilih pemula sudah menikah atau pernah menikah meskipun belum berusia 17 tahun; (3) Bertempat tinggal/ berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dari populasi yang ada, peneliti memutuskan untuk menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Setelah dilakukan perhitungan, dari populasi yang ada sebesar 3614 pemilih pemula, dengan kesalahan yang masih ditoleransi diambil sebesar 10 %, maka berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin tersebut maka diperoleh sebanyak 97 responden dengan pembulatan maka 100 responden. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal yakni "Tingkat pemahaman politik" yang akan dijabarkan dalam Definisi Operasional Variabel. Variabel penelitian ini adalah tingkat pemahaman politik, yakni kemampuan seseorang untuk membedakan, menerangkan, menyimpulkan, mengelompokkan, memberikan contoh, dan menuliskan kembali didasarkan pada pemahaman mereka tentang politik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yakni melalui angket tertutup dan menjawab secara langsung. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data melalui dokumentasi yakni untuk memberikan gambaran umum terhadap Kabupaten Sidoarjo baik secara fisik maupun non fisik. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah melalui skala likert, dengan membagi variabel yang diukur menjadi variabel indikator. Skala Likert terdiri dari 4 (empat) alternatif jawaban yakni, Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Hasil penelitian yang telah diperoleh akan diuji validitas dengan teliti dan tepat menggunakan SPSSVersion 26.0. sedangkan, untuk uji reliabilitas instrumen adalah melalui koefisien Alpha-Cronbach.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari tingkat pemahaman pelajar SMA secara menyeluruh terkait prosedur pelaksanaan terdapat 76 responden atau 66,67% atau dengan jumlah rata-rata 141,8 dari 114 responden memilih pelajar SMA memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Lalu, sebanyak 35 responden atau 30,70% atau dengan jumlah rata-rata 108,8 dari 114 responden memilih pelajar SMA memiliki tingkat pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pemilu kategori sedang, dan terdapat 3 responden atau 2,63% atau dengan jumlah rata-rata 64,67 dari 114 responden memilih pelajar SMA yang memiliki kategori rendah. Berikut diagram pemahaman pelajar SMA tentang prosedur pemilihan umum 2024.

Tabel 1. Hasil Tingkat Pemahaman Pelajar SMA tentang prosedur Pemilihan Umum 2024

Kategori	Rentang Skor	Jumlah Frekuensi	Persentase	Nilai Rata-rata
Rendah	42-83	3	2,63%	64,67
Sedang	84-125	35	30,70%	108,8
Tinggi	126-168	76	66,67%	141,8
		114	100%	

Selanjutnya peneliti juga menilai tingkat pemahaman siswa terhadap prosedur pemilihan umum berdasar dari jumlah kelamin, yakni antara pelajar laki-laki dan pelajar perempuan. Hasil analisa dan pengumpulan data berdasarkan perhitungan dan pemaparan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 28 responden atau 40,6% dari 69 responden perempuan memiliki tingkat pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pemilu yang tinggi dengan nilai rata-ratanya yaitu 151,25. Lalu, sebanyak 37 responden atau 53,6% dari 69 responden perempuan memiliki tingkat pemahaman sedang dengan nilai rata-rata yaitu 127,4, kemudian sebanyak 4 responden atau 5,8% dari 69 responden perempuan memiliki tingkat pemahaman yang rendah. perolehan nilai rata-rata pada tingkat pemahaman pelajar SMA kategori perempuan tentang prosedur pelaksanaan pemilu 2024 berjumlah 135,348.

Tabel 2. Hasil Tingkat Pemahaman Pelajar Perempuan tentang prosedur pelaksanaan Pemilu 2024

Rentang Skor	Kategori	Jumlah Frekuensi	Persentase	Rata-rata
139-168	Tinggi	28	40,6%	151,25
110-138	Sedang	37	53,6%	127,4
81-109	Rendah	4	5,8%	97,25
		69	100%	

Analisa yang diperoleh peneliti dari pelajar laki-laki di lingkup Kabupaten Sidoarjo antara lain endahuluan memuat tentang latar belakang, landasan teori, masalah, rencana pemecahan masalah dan tujuan penelitian. 24 responden atau 53,3% dari 45 responden laki-laki memiliki tingkat pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pemilu yang tinggi dengan nilai rata-ratanya yaitu 140,9. Lalu, sebanyak 19 responden atau 42,2% dari 45 responden laki-laki memiliki tingkat pemahaman sedang dengan nilai rata-rata yaitu 102,7, kemudian sebanyak 2 responden atau 4,5% dari 45 responden laki-laki memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Sehingga perolehan nilai rata-rata pada tingkat pemahaman pelajar SMA kategori laki-laki tentang prosedur pelaksanaan pemilu 2024 berjumlah 121,044.

Tabel 3. Hasil Tingkat Pemahaman Pelajar Laki-laki tentang prosedur pelaksanaan Pemilu 2024

Rentang Skor	Kategori	Jumlah Frekuensi	Persentase	Rata-rata
126-168	Tinggi	24	53,3 %	140,9

84-125	Sedang	19	42,2%	102,7
42-83	Rendah	2	4,5%	56,5
		45	100%	

Bandiangan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman pelajar di Kabupaten Sidoarjo juga dilakukan pada sekolah swasta dan sekolah negeri. Dalam perbandingan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang dihasilkan oleh asal sekolah pelajar terhadap tingkat pemahaman mereka akan prosedur pemilihan umum. Penelitian ini menghasilkan analisa dan pengumpulan data berdasarkan perhitungan dan pemaparan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 50 responden atau 61% dari 82 Responden pelajar swasta memiliki tingkat pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pemilu yang tinggi dengan nilai rata-ratanya yaitu 142,14. Lalu, sebanyak 29 responden atau 35% dari 82 responden pelajar swasta memiliki tingkat pemahaman sedang dengan nilai rata-rata yaitu 105,14, kemudian sebanyak 3 responden atau 4% dari 82 responden pelajar swasta memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Rata-rata yang diperoleh dari pelajar yang bersekolah di sekolah swasta berjumlah 127,500.

Tabel 4. Hasil Tingkat Pemahaman Pelajar SMA Swasta tentang Prosedur Pelaksanaan Pemilu 2024

Rentang Skor	Kategori	Jumlah Frekuensi	Persentase	Rata-rata
126-168	Tinggi	50	61%	142,14
84-125	Sedang	29	35%	105,14
42-83	Rendah	3	4%	48,5
		82	100%	

Sedangkan, hasil yang diperoleh peneliti terhadap pelajar SMA negeri di kabupaten Sidoarjo adalah bahwa terdapat 12 responden atau 37,5% dari 32 Responden pelajar negeri memiliki tingkat pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pemilu yang tinggi dengan nilai rata-ratanya yaitu 139,07. Lalu, sebanyak 17 responden atau 53,1% dari 32 responden pelajar negeri memiliki tingkat pemahaman sedang dengan nilai rata-rata yaitu 124,2. Kemudian, sebanyak 3 responden atau 9,4% dari 32 responden pelajar negeri memiliki tingkat pemahaman yang rendah. nilai rata-rata pada tingkat pemahaman pelajar SMA kategori laki-laki tentang prosedur pelaksanaan pemilu 2024 berjumlah 135,343.

Tabel 5. Hasil Tingkat Pemahaman Pelajar SMA Negeri tentang Prosedur Pelaksanaan Pemilu 2024

Rentang Skor	Kategori	Jumlah Frekuensi	Persentase	Rata-rata
142-168	Tinggi	12	37,5%	139,07
116-141	Sedang	17	53,1%	124,2
90-115	Rendah	3	9,4%	95,67
		32	100%	

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pemahaman pemilih pelajar SMA tentang prosedur pelaksanaan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Rata-rata skor tingkat pemahaman pemilih pelajar Kabupaten Sidoarjo adalah 129,70. Dalam tabel rentang skor tingkat pemahaman menunjukkan sebanyak 76 responden atau 66,67% yang memiliki tingkat pemahaman tinggi dengan nilai rata-rata berjumlah 141,8. Lalu, sebanyak 35 responden atau 30,70% yang memiliki tingkat pemahaman yang sedang dengan nilai rata-rata berjumlah 108,8. Kemudian, hanya terdapat 3 responden atau 2,63% yang memiliki pemahaman yang rendah

dengan nilai-rata-rata sejumlah 64,67. Tingkat pemahaman pemilih pelajar SMA tentang prosedur pelaksanaan pemilu yang tinggi artinya bahwa lembaga yang terkait atau dalam hal ini yang berwenang adalah KPU dalam upaya meningkatkan pemahaman pemilih pemula khusus nya pelajar tentang prosedur pemilihan umum 2024 di wilayah Sidoarjo telah tercapai dengan baik dibuktikan dengan mencapai rata-rata skor yang tinggi. Pemilih pelajar SMA wilayah Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan pendidikan politik melalui pembelajaran di lembaga sekolah seperti layaknya simulasi pemilihan organisasi siswa intra sekolah atau ekstrakurikuler dan sebagainya. Selain itu, pemilih pelajar SMA di wilayah Kabupaten Sidoarjo mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. selanjutnya pemilih pelajar SMA wilayah Kabupaten Sidoarjo telah sepenuhnya telah memahami jadwal dan teknis penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam hal ini bahwa telah menjadi upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pemahaman pemilih pemula dalam hal ini dikhususkan pada pelajar SMA dengan usia syarat tertentu melalui sosialisasi dikatakan berhasil tercapai. Responden yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah dengan jumlah frekuensi 3 atau 2,63% dari 114 responden dengan nilai rata-rata rendah yaitu 64,67. Hal tersebut dikarenakan salah satunya oleh faktor perilaku pemilih pemula yang cenderung tidak peduli dan labil terhadap dunia politik menyebabkan kesadaran dalam berpolitik kurang yang berdampak pada partisipasi dalam pemilu. Guna mengantisipasi dalam mencegah politik uang tersebut, maka Lembaga KPU terkait harus secara terus menerus melakukan sosialisasi khususnya kepada pemilih pemula dengan bekal pemahaman akan bahaya politik uang.

Saran yang diberikan peneliti sebagai upaya peningkatan pelajar SMA di Kabupaten Sidoarjo terhadap prosedur pemilihan umum antara lain: (1) Bagi pihak sekolah di Kabupaten Sidoarjo, dapat diberikan sosialisasi secara rutin terhadap pemahaman politik peserta didik; (2) Bagi pihak stakeholder pemilu, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai pihak yang terlibat dalam pemilu. Diharapkan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan sosialisasi secara teratur kepada sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta; (3) Kepada partai politik. Partai politik sudah semestinya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan sosialisasi politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan peneliti kepada dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih juga diucapkan oleh peneliti kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa, terima kasih juga diucapkan kepada teman-teman dan Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono. (2008). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 43.
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks, h. 70.
- Arniti, N. K. (2020). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Azirah. (2019). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi*. *Politica*: Vol. 6, No. 2
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 372
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Metode Penelitian dalam Pendidikan (edisi ke-6)*. London dan New York, NY: Routledge Falmer.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Erwin, Muhamad. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga, h. 141.
- Gabriel Almond. "sosialisasi kebudayaan, dan partisipasi politik" dalam Mochtar Mas'ood dan Colling Mac Andrews eds, op. cit. hlm.47.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Sekretariat negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab Iv Hak Memilih Pasal 19*. Sekretariat negara. Jakarta
- Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). *Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok*. Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 46– 50. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.969>
- Muhammad, H. A., Nopyandri, N., & Babas, U. (2020). *Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah Pinggirankota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada SerentakProvinsi Jambi Tahun 2020*. Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 19.
- Nasution, Adnan Buyung dan Patra M. Zen. (2006). “Instrumen International Pokok Hak Asasi Manusia”. Yayasan Obor Indonesia, h. 112
- Nur Wardhani, P. S. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2023). Melalui link <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/>. Diakses pada Juli 2023
- Ridwan. (2004). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta hal 71-95
- Sastroatmodjo, Sudjono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, hal 68.
- Sitepu, P. Anthonius. (2012). *Teoriteori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h, 88.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*. Jurnal Wacana Politik, 3(1), 14–28
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, h.7
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, h, 138.
- Suhartono, (2009). “*Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)*”, (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI) hal. 6
- Surbakti, R. (1997). *Partai, Memilih & Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik* (Cet. IV). Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Turyadi, Ito. (2022). *Partisipasi Pemilih Dipengaruhi Kurangnya Minat Politik Dan Ketidakpuasan Dengan Pilihan Kandidat Pada Generasi Xyz Di Kabupaten Bandung Barat*. *Public Service And Governance*. Journal Vol.3
- Yusdianto, (2010). *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, h. 44.